

PROPAGANDA POLITIK POPULISME: KEBERHASILAN *FREIHEITLICHEN PARTEI ÖSTERREICHS* (FPO) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF NASIONAL AUSTRIA 2017

I Nyoman Giri Kusuma¹⁾, Adi Putra Suwecawangsa²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email : girikusuma77@gmail.com¹⁾, adisuwecawangsa@yahoo.co.id²⁾,
aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The right-wing party in Austria, namely the Freiheitlichen Partei Österreichs (FPO) with a populist movement that surprisingly gained a significant number of votes in the Austrian National Legislative Election in 2017. This increase in votes is quite large for the far-right party, who has a bad history in Austrian politics. To answer the question regarding the efforts of the FPO party in attracting voter sympathy in the 2017 Austria legislative elections, researcher use the conceptual framework such as Populism and Propaganda. Furthermore, this research use qualitative-descriptive research methods with secondary data sources through library research. This research examine that the party led by Heinz Cristian Strache gain popularity when there were issues surrounding asylum seekers immigrants who came to Austria in large numbers. This issue has become the object of propaganda by populist group to spread the message that immigrants are a source of problems that burden the country and the lives of the Austrian people. Through the Propaganda approach, FPO contributes to shape the opinion of the majority Austrian people to secure voting rights holders for their party.

Keywords : *Freiheitlichen Partei Österreichs, Immigrant, Populisme, Propaganda.*

1. PENDAHULUAN

Populisme dikenal sebagai gaya politik berupa strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin, dengan mengedepankan konsepsi mengenai rakyat. Bahasan ini menjadi topik menarik dalam Studi Hubungan Internasional, karena kini populisme menjadi sebuah pandangan yang diadopsi oleh banyak aktor politik dunia baik dalam kontestasi politik, maupun proses pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, populisme akan dikaitkan dengan keberadaan partai sayap kanan.

Secara umum, istilah 'kanan-jauh' merupakan suatu konsep yang memayungi

pemikiran dan gerakan, seperti kanan radikal, populisme, kanan ekstrim, sayap kanan populis, dan kanan radikal populis (Mudde, 2007). Di Austria partai Kanan-Jauh diidentikan dengan *Freiheitlichen Partei Österreichs* (FPO). Pada awal kemunculannya partai kanan-jauh Austria ini hanya mampu memperoleh suara dengan jumlah yang sangat kecil. Stigma masyarakat terhadap partai ini, cenderung dikenal sangat ekstrem dan intoleran, sehingga mengurangi minat pemilih terhadap partai tersebut. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan konstelasi politik yang ada, secara perlahan kanan-jauh mampu mengonsolidasikan

dirinya, baik dalam bentuk pemikiran maupun lembaga partai.

Pada periode pertama, FPO didirikan oleh mantan anggota partai Nazi pada tahun 1956, yang merupakan partai dengan kecenderungan liberal dan Nasionalis-Jerman. Stigma itu menjadi warisan yang tidak pernah jauh dari pandangan masyarakat Austria, yang membuatnya sangat terisolasi dan terkucilkan sebagai akibat dari ideologinya. Pada tahun 2000, ketika FPO membuat perjanjian koalisi dengan *Österreichische Volkspartei* (OVP), respon negatif justru datang dari internasional terhadap Austria. Uni Eropa saat itu memberikan sanksi kepada Austria karena masuknya FPO ke dalam pemerintahan dengan sentiment xenophobia yang kuat dinegara tersebut. Sanksi itu akhirnya mengakibatkan terganggunya hubungan bilateral Austria dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Pernyataan yang pada saat itu datang dari perdana menteri Portugal sebagai presiden bergilir Uni Eropa, mengindikasikan bahwa terdapat penolakan yang datang dari negara-negara Eropa atas dasar ketidaksetujuan terhadap partai sayap kanan yang bergabung kedalam koalisi pemerintahan, yakni :

"If a party which has expressed xenophobic views, and which does not abide by the essential values of the European family, comes to power, naturally we wont be able to continue the same relationship as in the past, however much we regret it."

(Mcintosh, 2019)

Pada tahun 2017, FPO mampu menduduki perolehan suara yang signifikan dengan

peringkat tiga tertinggi yaitu sebanyak 26 %, dan selisih 0,9 % dengan *Sozialdemokratische Partei Österreichs* (SPO). Selisih tipis ini menunjukkan persaingan antara SPO dan FPO merupakan sebuah kemunduran bagi kaum kiri, karena berdasarkan *track record*, SPO merupakan partai dominan yang berada di pemerintahan nasional selama 40 tahun terakhir dengan intensitas pemegang jabatan kanselir terbanyak.

Keberhasilan partai sayap kanan di Austria telah menarik perhatian ditengah repurtasinya yang melejit mendulang suara yang signifikan. Pada umumnya, sebagian besar partai-partai sayap kanan-jauh yang ada di Eropa kini menunjukkan eksistensinya pada kontestasi politik nasional. Seperti misalnya di Perancis, *Front Nasional* (FN), *Alternative for Germany* di Jerman, *The Dutch Freedom Party* di Belanda (Oztig et al., 2019). Namun, jika dilihat dari hasil pemilihan, partai tersebut gagal untuk menduduki kursi kekuasaan. Sesuatu yang berbeda terjadi di Austria. Pasca pemilihan tersebut, FPO berhasil masuk kedalam pemerintah untuk menjalin koalisi baru dengan OVP yang sekaligus menandakan pergeseran arus politik ke kanan di Austria. Dengan melihat pemaparan latar belakang diatas, maka menimbulkan suatu rumusan masalah yakni "Bagaimana upaya *Freiheitlichen Partei Österreichs* (FPO) untuk mendapatkan simpati pemilih dalam pemilu legislatif Austria tahun 2017?"

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur hasil riset yang digunakan sebagai tinjauan

pustaka. Penelitian yang pertama berjudul “Eksistensi Populisme Pada Pemilu Prancis 2017” karya Rasmah Rajab. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa pemimpin menggunakan populisme sebagai alat untuk mengambil hati masyarakat. Tulisan ini menjelaskan Populisme partai FN (Front Nasional) yang dipimpin Le Pen tergambarkan melalui sentiment Anti-imigran, Anti-EU dan menggunakan isu SARA. Sikap kerasnya terhadap Uni Eropa terlihat jelas dengan menentang keras Perancis untuk masuk menjadi keanggotaan Masyarakat Uni Eropa, menolak Eurozone, dan menolak *Schengen Area*. Penggunaan slogan kampanye Le Pen yakni “*In The Name of People*” menggambarkan bukti pendekatannya terhadap rakyat.

Penelitian Rajab memberikan kontribusi berupa pemahaman populisme untuk menjelaskan strategi aktor politik dalam pemilihan umum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perpektif Populisme yang dibangun untuk menarik konstituen. Peneliti kemudian melihat perbedaan terhadap penelitian ini, yaitu subjek penelitian. Penelitian Rajab menggunakan Perancis sebagai subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Austria sebagai subjek penelitian. Penelitian ini juga akan melengkapi bagaimana penyebaran sikap populisme itu berhasil mempengaruhi masyarakat melalui teori propaganda. Sehingga dapat dipahami bahwa sikap politik akan berhasil jika melalui teknik penyebaran yang tepat.

Literatur kedua yang digunakan dalam penelitian ini yakni “*How populists securitize elections to win them: the 2015 double elections*

in Turkey” karya Osman Sahin (2021). Tulisan ini menjelaskan upaya sekuritisasi Partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) di Turki pada pemilu tahun 2015. Sekuritisasi yang dilakukan merupakan strategi populisme untuk mengamankan pemilihan dengan memicu persepsi ketidakamanan di masyarakat Turki untuk menghasilkan dukungan dalam pemilihan. Sahin berpendapat bahwa, wacana yang ditawarkan AKP untuk membangun suasana ketidakamanan adalah (1) Memprioritaskan ancaman ekstensial terhadap bangsa dan re-sekuritisasi terhadap kaum Kurdi (2) Adopsi nasionalisme Turki (3) Menjelekan HDP (*Halkin Demokrasi Partisi*) yang merupakan lawan politiknya dengan menyamakannya seperti terorisme (4) Membangun kemenangan AKP dalam pemilihan sebagai satu-satunya jalan keluar dari kekacauan yang ada.

Tulisan ini berkontribusi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana teori Sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan tindakan dan strategi partai dalam memperoleh keberhasilan di pemilihan. Sekuritisasi disini dapat menjelaskan ancaman ekstensial yang melanda negara, bagaimanapun juga tindakan aktor politik tidak akan terlepas dari kepentingan politiknya dalam memperoleh kekuasaan. Penulis kemudian melihat perbedaan terhadap penelitian ini, yaitu terkait isu dan teori yang digunakan. Pada studi kasus Austria peneliti menggunakan teori propaganda sebagai strategi keberhasilan partai FPO. Propaganda di Austria akan melibatkan isu pengungsi, yang tidak memfokuskan pembahasan kedalam ranah keamanan seperti pada teori sekuritisasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang dipakai sebagai kerangka pemikiran. Pertama perspektif populisme, menurut Mudde (2007,p.23) populisme diartikan sebagai ideologi yang berpusat kepada masyarakat, dimana mereka dipisahkan menjadi dua kelompok yang homogen dan antagonis yakni “*Pure People*” dan “*Corrupt Elite*”, yang diartikan bahwa elit yang berkuasa hanya dianggap sebagai kelas parasit yang hanya memperkaya diri sendiri dan secara sistematis mengabaikan keluhan rakyat. Sebagai bentuk pandangan *people centric*, Populisme juga memperdalam antipati dan diskriminasi terhadap mereka (*them*) yang berada di luar batasan dan meningkatkan peluang hidup mereka yang berada didalam batas-batas kekitaan (*us*).

Kedua Teori Propaganda, Menurut Mohamad Shoelhi (2012,p.27) Propaganda merupakan upaya untuk membentuk, mempengaruhi, mengubah dan mengarahkan serta mengendalikan sikap dan pendapat masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Semua itu dilakukan dengan menyebarkan gagasan ide dan menanamkannya secara sistematis pada lubuk hati targetnya. Dari pernyataan tersebut kemudian dapat diambil beberapa kata kunci untuk memahami propaganda yakni, terdapat proses menyebarluaskan pesan, mempengaruhi pendapat untuk suatu tujuan, serta sesuatu hal yang telah direncanakan. Dalam proses Propaganda untuk kepentingan politik, melalui upaya pembentukan wacana terlebih dahulu. Komunikasi dalam propaganda sejatinya

dilakukan untuk menciptakan suatu ‘kenyataan lain’ atau ‘kenyataan kedua’ dalam bentuk wacana (*discourse*) dari kenyataan pertama (keadaan) (Soelhi, 2012,p.107). Jalan yang ditempuh untuk menciptakan wacana (kenyataan kedua) merupakan sebuah proses konstruksi kenyataan (realitas). Dalam kasus ini, propaganda dari FPO akan dikaitkan dengan isu migran yang melanda Austria.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Neuman, memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu proses, mekanisme atau hubungan antarkelompok (Neuman, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan sumber sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui hasil pengolahan pihak lain. Data kualitatif dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan responden, dokumen yang diperoleh melalui berbagai literatur, jurnal ilmiah dan media cetak atau elektronik.

Dalam penelitian ini, unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok parta politik. Pada proses analisa data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Sugiyono (2019), yakni terdapat empat komponen dalam menganalisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu data akan disajikan kedalam bentuk raian, bagan, *Flowchart* dan sejenisnya secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Basis Ideologi Dan Perkembangan Awal *Freiheitlichen Partei Österreichs*.

Menurut Cas Mudde (2007,p.22), ideologi sayap kanan umumnya terbagi menjadi tiga dasar antara lain Nativisme, Otoritariannisme, Populisme. Populisme diartikan sebagai ideologi yang berpusat kepada masyarakat yang pada akhirnya dipisahkan menjadi dua kelompok yang homogen dan antagonis, “*Pure People*” dan “*Corrupt Elite*” yang berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari *Volonté Générale* (kehendak umum) (Mudde, 2007,p.23). Populisme mengguakan sikap yang menentang elite korup yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Dalam hal ini FPO mengklaim diri sebagai bagian dari populis dan nasionalis dengan berusaha menggambarkan diri sebagai partai yang mewakili suara rakyat Austria.

Freiheitlichen Partei Österreichs merupakan sebuah partai yang terbentuk pada tahun 1949 oleh mantan anggota partai Nazi yaitu Anton Reinthaller dengan kecenderungan Liberal Nasionalis German. Sejak tahun awal terbentuk, FPO menjadi sebuah partai yang menentang gagasan identitas nasional Austria dan mereka bertindak sebagai pewaris gerakan pan-Jerman yang mencakup tahun-tahun pemerintahan Nazi di Austria. Melihat *treck record* FPO dalam politik Austria, pada tahun 1986 partai ini dipimpin oleh Jorg Haider yang memindahkan partai ini menjadi partai sayap

kanan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Haider mencoba untuk merubah pandangan mengenai pan-Jerman dengan patriotisme Austria, sikap patriotik ini membantu partai untuk melampaui tradisi pan-Jerman sebelumnya yang tidak menarik banyak pemuda Austria (Pelinka, 2001). Perubahan arah partai ini cukup berhasil membawa FPO pada suatu masa keemasan dibawah kepemimpinan Jorg Haider. Sampai pada akhirnya FPO mencetak kemenangan politik pada pemilu tahun 1999, yang membuatnya berhasil bergabung menjadi bagian dari pemerintahan dengan jalinan koalisi dari OVP.

4.2 Isu Imigran Di Eropa Dan Kaitannya Dengan Austria.

Sebagai hasil dari *Masstrich Treaty*, Uni Eropa memperkuat integrasi kewasanya dengan mengadopsi skema *Schengen Area* melalui *Amsterdam Treaty* secara menyeluruh kedalam institusi pemerintahannya. *Schengen Area* dapat mengatur pergerakan lintas batas yang mencakup barang dan jasa, pergerakan bebas manusia, kebijakan imigrasi dan suaka, perlintasan perbatasan eksternal, kejasama bea cukai dan peradilan sipil (Wardhani, 2019). Seiring dengan munculnya krisis pengungsi, Schengen justru menimbulkan berbagai macam permasalahan baru. Pada dasarnya mekanisme penghapusan kontrol pada perbatasan internal negara Eropa dalam skema Schengen justru menimbulkan potensi penyebaran tindak kejahatan, karena skema ini memberikan kemudahan perpindahan manusia yang susah untuk di kontrol.

Tahun 2015, merupakan sebuah tahun dimana besarnya skala arus migrasi telah melanda kawasan Eropa. Menurut laporan Pew Research Center jumlah imigran yang datang dan mencari suaka ke Uni Eropa pada tahun 2015 sebanyak 1,3 juta orang (Pew Research, 2016). Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan menjadi titik tertinggi dalam sejarah imigrasi Eropa. Data yang dikutip dari Eurostat (2016), berdasarkan kewarganegaraan menunjukkan Suriah (362.775), Afghanistan (178.230) dan Iraq (121.535) menjadi negara dengan jumlah pencari suaka tertinggi yang datang ke Eropa tahun 2015.

Sebagian besar para pengungsi untuk mencapai daratan Eropa dilakukan melalui Yunani, karena Yunani merupakan negara yang berada dipinggir selatan benua Eropa dan berbatasan langsung dengan benua Asia dan Afrika. Hal ini mengakibatkan pemerintah Yunani kewalahan dengan banyaknya orang yang bermigrasi tiba di pantai mereka.

Meskipun Austria sering dianggap sebagai negara transit tujuan para pengungsi yang ingin menuju ke Jerman, namun sejumlah besar orang justru mengajukan permohonan suaka di Austria. Menurut laporan dari BMI (2017), selama empat belas tahun terakhir angka imigrasi permohonan suaka tertinggi yang diterima Austria adalah pada tahun 2015, dengan jumlah 89.098 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pemohon suaka hanya 28.064, artinya peningkatan itu terjadi sebanyak tiga kali lipat dari tahun 2014. Angka ini menjadikan Austria sebagai salah satu negara

anggota Uni Eropa dengan jumlah pencari suaka tertinggi selama krisis pengungsi, yakni dengan peringkat keempat di Uni Eropa setelah Jerman, Hungaria dan Swedia.

Ketika pengungsi pertama kali datang tahun 2015, awalnya mereka mendapatkan penerimaan yang baik dari orang-orang Austria. Sebanyak 20.000 masyarakat Austria berkumpul di kota Wina untuk berdemonstrasi menentang perlakuan buruk terhadap imigran, dengan menyerukan perlakuan adil terhadap mereka yang melarikan diri dari konflik yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah (Aljazeera, 2015). Demonstrasi mereka juga disertai spanduk yang bertuliskan "*Refugee Welcome*". Sebagian besar masyarakat telah meyakini bahwa setiap orang berhak untuk mencari perlindungan ke negara lain, untuk menghindari konflik dan penganiayaan yang mereka alami. Namun, dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Austria Integration Fund terkait barometer integrasi, menyatakan dalam survey tentang koeksistensi Masyarakat Austria dan para imigran tahun 2015 menunjukkan 43% populasi Austria mengklasifikasikan 'buruk'. Sedangkan, survey yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan persentasi opini negatif masyarakat Austria, yaitu sebanyak 51% (Mag & Siegl, 2019). Dengan ini, peristiwa tahun 2015 tersebut sangatlah berubah-ubah selama dan setelah 2015. Peningkatan persentase survey antara tahun 2015 dan 2017 kemudian mulai dipertanyakan, apakah hal ini dipengaruhi dengan adanya dukungan kepada kelompok sayap kanan.

4.3 Elemen Populisme Dan Penggunaan Politik Identitas Dalam Kampanye FPO.

FPO merupakan satu-satunya partai sayap kanan jauh di Austria, dimana langkah politik mereka bergerak maju untuk mempertahankan kedaulatan nasional atas nama rakyat. Seperti dalam slogan kampanyenya yang berbunyi "*Because we take your worries seriously*" (Pisoiu & Ahmed, 2016), yang menginterpretasikan bahwa FPO hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi rakyat Austria.

FPO juga menggunakan manifesto "*Austrian first*", dengan tolak ukur untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan rakyat Austria yang harus mendapatkan tempat prioritas utama. Heinz Crishtian Strache merupakan pimpinan partai FPO yang secara konsisten membangun sikap anti-elitis terhadap pemerintah yang berkuasa. Ideologi FPO dibawah Strache ialah, "*Commit to protecting our homeland of Austria, our national identity and autonomy as well as natural life*" (Mölzer, A dkk, 2014) Bentuk manifestasi tersebut dikeluarkan dengan sikap mendesak keamanan perbatasan yang lebih baik serta kontrol yang lebih ketat terhadap imigrasi dan pencari suaka. Hal ini sesuai dengan yang ada pada perspektif populisme, bahwa partai sayap kanan radikal cenderung menampilkan diri mereka sebagai kelompok alternatif yang digambarkan lebih dekat dan peduli dengan rakyat.

Populisme telah memberikan pengaruh terhadap gaya komunikasi politik para elit. Penekanan pada konsep mengenai rakyat yang seharusnya bersifat homogen, telah

meminggirkan pandangan multikultural dalam entitas negara. Dengan begitu, terdapat pihak terpinggirkan yang dipandang tidak memiliki ikatan dengan mereka. FPO menggunakan pandangan populis untuk menggunakan isu-su identitas terkait isu agama. Seperti yang dikatakan Strache yakni, "*Austria is not imigration Country and Islam is not part of Austria*" (Lynfield, 2017). Isu yang tidak luput dari bahasan kampanyenya FPO ialah keberadaan Islam di publik Austria. Mereka secara terang-terangan menolak kehadiran Islam di ruang publik karena sejatinya penentangan imigrasi Muslim atas nama budaya tradisional lokal dan identitas agama nasional, digunakan untuk membela identitas negara.

Strache menganggap bahwa menerima kedatangan pengungsi yang berasal dari negara luar dari Eropa merupakan suatu kebijakan yang mendorong bentuk islamisasi secara menyeluruh di Eropa. Kedatangan para pengungsi yang berasal dari negara Islam telah dianggapnya hanya akan menambah populasi masyarkat Islam secara demografi di Austria. Seperti yang disampaikan strache dilain kesempatan yaitu,

"Quickly put an end to the policy of Islamization otherwise we Austrians, we Europeans will come to a quick end" (Lynfield, 2017).

FPO memanfaatkan pandangan mengenai Muslim, yang kemudian dengan mudah melampirkannya kepada arus pengungsi untuk memproyeksikan sebuah citra bagaimana Austria dikepung oleh ribuan populasi dari luar dan menyampaikan maksud bahwa masyarakat

Austria dibawah identitas Eropa sangat membutuhkan perlindungan dari itu semua, karena dianggap menginvasi dan mengancam identitas Eropa.

Gambar 1. Poster Kampanye FPO



Sumber : Carla Bleiker (2018)

Kekuatan politik partai FPO dalam pemilu tahun 2017, kian marak dibangun dalam beberapa bentuk upaya dengan menawarkan sebuah pandangan kedalam bentuk poster seperti gambar diatas. Melihat poster kampanye FPO yang berisikan wajah Strache di jalanan Austria, dengan statement yang tertulis disana “*Im Umgang mit Flüchtlingskrisen, Grenzschutz und Islamisierung*”. Artinya, FPO merupakan sebuah partai dengan perhatian utama untuk menangani krisis pengungsi, kemanaan perbatasan dan islamisasi. Melalui pernyataannya tersebut terlihat FPO menunjukan kendali atas situasi migrasi nasional yang dilihat banyak orang sangat terabaikan dalam sisi politik

4.4 Analisis Upaya Propaganda FPO

Selama proses propaganda itu berlangsung, keberadaan audience sangat dibutuhkan untuk menjadi target propaganda untuk pembentukan opini masyarakat. Dalam kasus ini masyarakat Austria merupakan target propaganda oleh FPO. Pembahasan akan menggunakan tiga teknik

dalam teori Propganda (Soelhi, 2021,p. 58) yaitu *Scapegoat* (menciptakan pihak kambing hitam), *Name Calling* (pemberian nama/label), *Fear Arousing* (membangkitkan ketakutan).

4.4.1 Penggunaan Teknik *Scapegoat* Terhadap Kondisi Domestik Austria.

Melalui kacamata *Scapegoat*, propaganda dilakukan dengan membuat kebencian, mengarahkan permasalahan yang terjadi dengan menciptakan kambing hitam. *Scapegoat* dilakukan dengan menyudutkan pemerintah atas situasi krisis yang terjadi di Austria. Permasalahan pengungsi telah memberikan tantang bagi Uni Eropa itu sendiri, meskipun seharusnya itu diatasi dengan semangat solidaritas negara-negara anggotanya. Tetapi, tantangan terhadap berbagai beban yang pada akhirnya datang sebagai konsekuensi dari menerima pengungsi tidak dapat dihindarkan, yang akhirnya justru membentuk sikap oposisi terhadap penanganan krisis pengungsi di Austria.

Krisis pengungsi telah membuat kanselir Faymann kehilangan arah. Kanselir Austria yang menjabat saat itu Werner Feymann dengan kebijakannya untuk membuka perbatasan awalnya merupakan keputusan yang mengikuti garis kanselir Angela Meke di Jeman dan budaya menyambut pengungsi atau yang disebut *Willkommenskultur* oleh kaum sosial demokrat. Keputusan itu membuat Austria menerima lebih dari 80.000 orang mengajukan permohonan suaka. Ditambah lagi ketiadaan solusi mengenai distribusi migran yang adil di antara negara-negara Eropa telah menunjukan

sikap ketidakadilan pembagian beban mengenai jumlah kuota pengungsi di pada setiap negara anggota, yang membuat Austria harus memikul beban tersebut.

FPO sebagai sebuah partai oposisi pada periode tersebut, memiliki peran yang kuat untuk mengkritisi sistem pemerintahan. Dimana mereka akhirnya mengecam keputusan pemerintah untuk membuka perbatasan Austria bagi ratusan ribu pengungsi dan imigran. Sikap Anti-elitis Strache ini tertuang dalam Program TV ORF, dimana ia berkata:

“Refugee crisis shows the government is unable and unwilling to protect Austria’s national borders, which is its legal duty” (Kroet, 2015).

Membludaknya imigrasi di Austria dianggap sebagai kesalahan kelompok partai arus utama yang pro-imigran, yang disebabkan oleh politik ramah imigrasi dengan membuka perbatasan secara bebas. Misalnya dilain kesempatan dari kampanye Strache yang juga mengatakan :

“Not just since the migration crisis in 2015, but for decades they pushed for a totally irresponsible, undifferentiated policy of immigration from outside Europe, and with that naturally Islamist terror entered the heart of Europe” (Press TV, 2017).

Kalimat *“they pushed for a totally irresponsible policy”* dimaknai sebagai kalimat yang bernada menyerang lawan politik pada periode tersebut yakni Kanselir Werner Faymann dari partai SPO, yang selama ini dianggap bertanggung jawab atas semua kebijakan yang ada terkait imigrasi. Sebagai partai sayap kanan FPO memiliki kepentingan

yang berbeda dengan pemerintah Austria, sehingga membuat tindakan yang diambilpun berbeda. Pemerintahan Austria yang dikuasai oleh kaum kiri yang pro imigran menjadi kambing hitam atas situasi negara. Sikap FPO telah membuktikan bahwa kemampuan partai oposisi sayap kanan di Austria telah mampu memberikan tekanan kepada pemerintahan liberal

4.4.2 Penggunaan Teknik Name Calling Dalam Mengidentifikasi Para Imigran.

Pembahasan selanjutnya yaitu teknik *Name Calling* atau *Labeling* atau pemberian nama. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengasosiasikan seseorang atau gagasan dengan simbol dan makna tertentu. Dalam beberapa kali kesempatan, Strache mengeluarkan sikap yang sangat keras terhadap para imigran pencari suaka. Alih-alih untuk menyebut mereka sebagai imigran pencari suaka atau pengungsi, mereka menggunakan ungkapan seperti “kriminal” dan “teroris” untuk mengidentifikasi kelompok pengungsi. Kekhawatiran akan kehadiran kelompok lain di Austria telah menciptakan kebencian tanpa sebab.

Pernyataan diatas kemudian dibuktikan dalam sebuah slogan kampanye FPO yang berbunyi *“Security for our citizens instead of open borders for criminals”* (Alison Langley, 2015). Perhatian yang diberikan memang terlihat jelas diarahkan kepada para imigran yang datang ke Austria. Strache telah berulang kali menyerukan Austria untuk mengambil langkah-langkah tegas dan berani menolak para migran.

Seruan ini dimanifestasikan kedalam sikap mendorong pembangunan tembok perbatasan antara Austria dan Hongaria yang merupakan jalur masuknya para imigran melalui rute Balkan. Tidak hanya membangun tembok perbatasan, FPO juga bersikeras menyampaikan bahwa perbatasan juga harus dijaga dengan ketat oleh patroli tentara, karena tentara tidak boleh menjadi “*Welcoming Organization*” untuk menerima arus pengungsi (Pisoiu & Ahmed, 2016). Setidaknya dengan dilakukannya mekanisme tersebut dapat menutup dan memperkuat kontrol perbatasan.

Sebagai bentuk tekanan kelompok sayap kanan, pada akhirnya pemerintah Austria membuat kebijakan untuk membangun sebuah sistem pengelolaan perbatasan melalui penetapan *upper limit policy* pada 20 Januari 2016. Dimana, setiap kota di negara itu wajib untuk menampung setidaknya 15 orang pencari suaka per 1.000 penduduk. Sehingga ditetapkan batas 127.000 pencari suaka atau 1,5% dari jumlah populasi Austria untuk empat tahun berikutnya. Pembagian tersebut dialokasikan secara menurun setiap tahunnya. Tahun 2016 telah ditentukan batas tahunan hanya sebesar 37.500 permohonan suaka, 35.000 untuk 2017, 30.000 untuk 2018 dan 25.000 untuk 2019 (Bischof & Eds, 2017). Peraturan khusus ini menetapkan bahwa setelah batas atas tercapai, pengungsi kemudian akan ditolak di perbatasan dan permohonan suaka tidak akan diterima lagi.

Kebijakan ini menuai respon Sebastian Kurz dari partai OVP tentang keinginannya untuk mengurangi kembali pembatasan jumlah

permohonan suaka. Dimana OVP menginginkan pengurangan jumlah permohonan suaka yang datang ke Austria menjadi setengahnya yaitu 17.000 ditahun 2017. Namun, FPO juga bersikeras untuk merespon kebijakan tersebut dengan mengatakan :

“We don't need an upper limit or the upper limit to be reduced by half- we need zero immigration, actually minus immigration, because all illegal individuals and criminals belong outside of the country” (DW, 2017).

Strache mengatakan Austria sebetulnya tidak memerlukan pengurangan jumlah imigran, karena Austria sejatinya tidak membutuhkan imigran sama sekali. FPO mengkonstruksikan imigran sebagai masalah bagi masyarakat dan negara, dimana melalui pernyataan itu menggambarkan wajah imigran sebagai kriminal yang harus diperangi dan dicegah untuk masuk kedalam Austria.

4.4.3 Penggunaan Teknik *Fear Arousing* Untuk Membangkitkan Ketakutan Masyarakat Austria

Dalam melakukan propaganda, propagandis juga melakukannya dengan teknik *Fear Arousing*. Selama proses politik ini berlangsung, rasa takut bekerja dengan cara yang paling berbahaya, digunakan untuk membangkitkan nafsu mempengaruhi opini publik. Menurut Freud (2007), kecemasan dalam masyarakat bukanlah bagian dari hubungan politik secara alami, melainkan dibangun oleh aktor atau yang disebutnya dengan “*fear entrepreneur*”. Artinya, ketakutan merupakan subjek dari proses politisasi dan

menjadi alat politik untuk membentuk dan mengontrol massa melalui fragmen narasi dan wacana tertentu.

Perkembangan jumlah pengungsi yang masuk ke Austria ini juga telah menimbulkan suatu kekhawatiran sebuah bentuk ekspansi dari jaringan ekstrimis *Islamic State* di Uni Eropa melalui perekrutan para imigran dari Suriah dan Irak. Dikutip dari Reuters, Strache secara tegas menghubungkan imigran muslim dengan terorisme:

"Not every Muslim is a terrorist, but nearly every terrorist in Europe in years past was a radical Islamist" (Knolle, 2017)

Lebih lanjut :

"Hundreds of dead and injured people who fell victim to the terror it caused testify to the dangers of Islamism" (Scheidinger, 2017)

Strache meyakini bahwa kegagalan partai arus utama untuk melihat bahaya dengan mengizinkan imigrasi dari semua negara dan wilayah Eropa menyebabkan peluang masuknya teroris ke Austria. Sikap ini secara tidak langsung menggeneralisasikan pengungsi sebagai teroris. Dalam melakukan propaganda, aktor perlu memang mengidentifikasi identifikasi suatu pihak yang harus ditakuti untuk membangkitkan ketakutan pada masyarakat, dimana aktor terbukti mengaitkan beberapa kualifikasi dengan para imigran.

Partai ini juga menaruh perhatian pada dimensi ekonomi Austria. FPO menggunakan kekhawatiran para kaum muda dan kelas menengah atas kehilangan pekerjaan dan distribusi manfaat sosial. Pada tahun 2015,

kondisi ekonomi Austria mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran sebesar 5,72%, dimana angka ini terus meningkat sejak tahun 2011 yang hanya sebanyak 4,56%. Angka ini juga terus meningkat pada tahun 2016 dengan tingkat pengangguran mencapai 6,01% (Statista, 2021). Dalam kampanyenya di kota Wina Strache mengatakan, *"Highest tax burden, highest unemployment and now the refugees"* (Alison Langley, 2015). Resiko pengangguran yang tinggi di kalangan pemilih muda yang kurang berpendidikan telah memicu ketakutan mengenai masa depan masyarakat Austria, sehingga mampu membangkitkan ambisus untuk suatu perubahan. Dilain kesempatan, Johan Uberbacher juru bicara FPO mengatakan :

"In Austria we have problem with Refugee. They are not Refugee, they economic immigrant" (Walter Klingenbeck, 2017).

Penggunaan kata "imigran ekonomi" kepada pengungsi dilihat sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menutupi fakta bahwa mereka lari dari perang. Dalam pernyataan ini menggambarkan bahwa imigran yang datang ke Austria sebenarnya tidak datang untuk mendapatkan perlindungan karena rasa takut akan keselamatan mereka, melainkan bersaing untuk peluang pekerjaan dengan orang Austria. Ini merupakan gagasan propaganda FPO guna menyebarkan ketakutan pada masyarakat Austria bahwa ketersediaan pekerjaan adalah suatu permasalahan utama.

Pada negara Austria, orang yang berhak atas suaka dan perlindungan atau pengungsi dianggap setara dengan orang Austria (Spahl et

al., 2021), oleh karena itu mereka memiliki akses penuh ke pasar tenaga kerja dan manfaat sosial. Ditambah lagi dalam undang-undang Uni Eropa menetapkan bahwa pencari suaka harus menerima akses efektif ke pasar tenaga kerja dalam waktu sembilan bulan setelah mengajukan permohonan suaka (Josipovic & Reeger, 2016). Maka, hal inilah yang selanjutnya dilihat akan menimbulkan kekhawatiran terkait persaingan secara ekonomi bagi masyarakat asli Austria.

FPO juga menganggap bahwa keberadaan imigran telah menimbulkan ketidakadilan dalam hal distribusi manfaat sosial. Partai ini berpandangan pajak yang dibayarkan seharusnya digunakan penuh untuk kesejahteraan rakyat Austria, bukan didistribusikan kepada para pengungsi kedalam bentuk uang. Mereka menganggap semua distribusi dari manfaat sosial harus dibagikan kepada rakyat Austria dan bukan kepada orang asing (Diepresse, 2017). Partai ini mengklaim bahwa negara justru menghabiskan jumlah uang yang besar untuk kesejahteraan imigran, sehingga dalam platform agenda politik mereka mendorong dukungan untuk pembuatan kebijakan yang menganjurkan pemotongan tunjangan migrasi.

Fear Arousing yang di luncurkan FPO juga melibatkan aspek budaya dan identitas negara Austria. Imigrasi telah mendorong pertemuan manusia, begitu juga budaya yang ada didalamnya. FPO merupakan sebuah partai sayap kanan jauh ekstrem yang terkenal dengan orientasinya pada prinsip-prinsip Kristen sebagai pondasi dalam melihat identitas dan budaya

Austria. Prinsip ini ditujukan untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat Austria untuk generasi mendatang. Hal ini sangat jelas terlihat dalam pernyataan Strache yaitu :

“We Have a Christian culture, and we want to keep a Christian culture for our children”
(Alison Langley, 2015).

Adanya perbedaan budaya, etnis, dan agama dengan para imigran membuatnya lebih menonjol dan menjadi bagian dari narasi dalam menggunakan ketakutan politis. FPO membangun kegelisahan utama masyarakat Austria, mereka merasa takut bahwa masa depan Eropa dan Austria berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dalam rentang waktu 2012-2016 terlihat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim terjadi sebanyak 126.124 orang (Mohrn, 2019), yang menandakan bahwa krisis imigran di Eropa memang berkontribusi menambah jumlah populasi Muslim di Austria. Perkembangan demografi masyarakat Muslim di Austria ini selanjutnya dapat dikaitkan mengenai agenda politik FPO terkait pertahanan nilai dan budaya asli kristen di Austria. Partai FPO ini memainkan peran kunci dalam kecemasan terhadap migran atau “*out-grup*” dengan menempatkan migrasi sebagai ‘biang kerok’ sumber permasalahan negara. Kekhawatiran dan ketakutan ini digunakan oleh partai ini untuk menunjukkan kemungkinan degradasi identitas nasional oleh orang luar. Maka narasi yang dibangun oleh partai FPO dalam melakukan propaganda dapat disimpulkan kedalam 3 bentuk yakni, (1) Menggunakan ketakutan terhadap potensi

ancaman terorisme dan kriminalitas (2) Ketakutan terhadap permasalahan ancaman ekonomi, (3) Ketakutan terhadap hilangnya nilai dan budaya Austria.

Melihat hasil dalam jejak pendapat yang dilakukan sebelum pemilihan berlangsung, FPO justru menduduki perolehan suara tertinggi yaitu sebanyak 30% suara, posisi ini menjadikannya partai terkuat di Austria. Meskipun hasil ini bukan perolehan suara dalam pemilu sebenarnya, namun perolehan itu telah menunjukkan kemampuan partai FPO berada di atas partai lainnya. Respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah Austria dinilai kurang memuaskan, dimana sikap tidak konsisten pemerintah kemungkinan besar tidak disukai oleh masyarakat Austria, dari yang awalnya membuka gerbang perbatasan negaranya lebar-lebar, kemudian berubah menjadi memperketat dan membatasi penerimaan pengungsi. Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Gfk-Austria tahun 2017 (dikutip dari Kohler, 2017) menunjukkan hanya sebanyak 37% masyarakat yang puas dengan cara pemerintah menangani masalah pengungsi dan 63 % mengkritik keras pemerintah atas pengelolaan pengungsi. Selain itu 90% setuju dengan kebijakan yang membatasi suaka dan imigrasi, yang juga membentuk motif utama mereka untuk memilih partai sayap kanan seperti FPO.

Perolehan suara sebesar 26% oleh FPO pada pemilu legislatif Austria 2017 telah menunjukkan bahwa pada dasarnya paham prinsip Populisme lebih mudah diterima dan diterjemahkan oleh masyarakat dimasa krisis itu terjadi, karena seolah-olah lebih menunjukkan

keberpihakan terhadap rakyat itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan benang merah antara Propaganda dan Populisme. Dimana, Populisme merupakan ideologi yang menentukan sikap dari partai FPO dan Propaganda merupakan teknik penyebarannya kepada masyarakat Austria. Dengan kata lain, kelompok populis memproposikan pesannya melalui teknik propaganda kedalam bentuk komunikasi politik.

5. KESIMPULAN

Peningkatan suara *Freiheitlichen Partei Österreichs* dalam pemilihan legislatif tahun 2017 menandai keberhasilannya, sehingga mereka mendapatkan kedudukan dalam parlemen dan menjadi bagian dari pemerintahan Austria. Propaganda Politik Populisme dari FPO, melihat fenomena krisis imigran sebagai sumber masalah dan menekankan pada resiko yang dapat ditimbulkan bagi negara. Gagasan mengenai propaganda pada isu imigran yang dilakukan sejak tahun 2015 telah berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat Austria. Pandangan masyarakat Austria terbukti berubah ketika periode awal masuknya para imigran ke Austria dan pada tahun 2017. FPO menggunakan persepsi mengenai krisis yang melanda Eropa untuk meyakinkan masyarakat Austria melalui pesan yang bersifat *urgent*. Strategi ini dilakukan untuk mengamankan para pemilih di Austria. Dalam memicu persepsi masyarakat Austria, FPO menggunakan skema yang melibatkan teknik *Name Calling*, *Scapagoat*, *Fear Arousing* selama kampanyenya. Maka upaya keseluruhan FPO dan agenda politiknya terhadap krisis imigran

disimpulkan sebagai kombinasi populisme dan propaganda yang pada akhirnya memberikan daya tarik melalui penawaran sikap dan pandangan partai.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Cas Mudde (2007). *Populist radical right parties in Europe*. New York : Cambridge University Press

Mohammad Shoelhi (2012). *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Neuman, W.L (2014). *Social research Method: Qualitatif and Quantitative Approach 7th Edition*. Pearson

Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>.

Jurnal/Dokumen/Publikasi Ilmiah :

Bischof, G., & Eds, D. R. (2017). Migration in Austria. In *Migration in Austria* (Vol. 26). <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89kvv>

BMI, (2019). *Asyl Jahresstatistik 2018*. 1–24. https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2018.pdf

Eurostat Press Office. (2016). *Asylum in the EU Member States: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015*. Eurostat Press Office, March, 1–6. <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>

Furedi, F. (2007). The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself. How human thought and action are being stifled by a regime of uncertainty. *Spiked*, 2(April), 1–11.

Josipovic, I., & Reeger, U. (2016). 15 Refugee Integration in Austria: Understanding the Implications of the Integration Policy Environment for Individual Motivations and Resources. 299–315.

Kohler, M. (2017). Austrian Public Opinion in the "Refugee Crisis." *Migration in Austria*, 257–272. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89kvv.14>

Mag, P. H., & Siegl, A. (2018). *Integrations Barometer 2018*. Osterreichischer Integrations Fonds

Morhn, M (2019). Anteil der Muslime an der Bevölkerung in Österreich von 1971 bis 2016. Dikutip pada 8 Februari 2022, dari <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/807559/umfrage/bevoelkerungsanteil-der-muslime-in-oesterreich/>

Mölzer, A dkk (2014). *Populist snapshots: Austrian Freedom Party (FPÖ) in the European Parliament*. Dikutip melalui, https://www.opendemocracy-net.translate.google/en/can-europe-make-it/populist-snapshots-austria/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc

Oztig, L. I., Gurkan, T. A., & Aydin, K. (2019). The Strategic Logic of Islamophobic Populism. *Government and Opposition*, 56(3), 446–464. <https://doi.org/10.1017/gov.2019.35>

Pelinka, A (2001). The Haider Phenomenon in Austria: Examining the FPO in European Context. *The Journal of International Institute* Volume 9, Issue 1, Fall 2001

Pew Research Center (2016). *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Dikutip pada 10 Januari 2022 dari <https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/>

Pisoiu, D., & Ahmed, R. (2016). *Capitalizing on Fear: The Rise of Right-Wing Populist*

- Movements in Western Europe. *OSCE Yearbook 2015*, 165–176. <https://doi.org/10.5771/9783845273655-165>
- Rajab R & dkk (2019). Eksistensi Populisme Pada Pemilu Prancis 2017. *Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin* Volume 4 No. 1
- Spahl, W., Weiss, S., Kohlenberger, J., & Buber-Ennsner, I. (2021). Immigration and the Social Welfare State in Austria, Germany, and Switzerland: A Comparative Meta-Study. *Institut Für Demographie - VID*, 1, 1–33. <https://doi.org/10.1553/0x003ccec>
- Statista (2021). Austria: Unemployment rate from 1999 to 2020. Dikutip pada 1 April 2022, dari <https://www.statista.com/statistics/262695/unemployment-rate-in-austria/>.
- Wardhani, T. K. (2019). Integrasi Regional Eropa Pasca Krisis Pengungsi 2015: Peran Area Schengen dalam Rekonstruksi Identitas Eropa melalui ‘Spatial ‘Othering.’” *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i1.12941>
- Situs Online :**
- Aljazeera (2015). Thousands of refugees arrive in Vienna and Munich. Diakses pada 27 maret 2022, dari <https://www.aljazeera.com/news/2015/9/1/t-hundreds-of-refugees-arrive-in-vienna-and-munich>
- Alison Langley, (2015). Refugee crisis is a boon to Vienna's far-right party. Diakses pada 7 Februari 2022, dari https://www.dw.com.translate.google/en/refugee-crisis-is-a-boon-to-viennas-far-right-party/a-18772019?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Carla Bleiker (2018). Austrian far-right FPÖ draws ire over refugee internment plan. Diakses pada 24 Februari 2022, dari <https://www.dw.com/en/austrian-far-right-fp%C3%B6-draws-ire-over-refugee-internment-plan/a-42043782>
- Diepresse, (2017). FPÖ plakatiert Kurz, Kern und Gusenbauer. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://www.diepresse.com/5282218/fpoe-plakatiert-kurz-kern-und-gusenbauer>
- DW (2017). Austrian Freedom Party leader Strache calls for 'Islamization ban'. Diakses pada 15 Februari 2022, dari <https://www.dw.com/en/austrian-freedom-party-leader-strache-calls-for-islamization-ban/a-37135625>
- Knolle, K (2017). From Haider to Strache - the FPO's march to respectability in Austria. Dikutip pada 6 Februari 2022 dari, <https://www.reuters.com/article/us-austria-election-fpo-idUSKBN1CL2E4>
- Press TV, 2017, 15 Oktober. Austria's far-right party attacks Islam, refugees. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0PQ11mrGsFI>.
- Kroet, C (2015). Austrian far right sues government on migrants. Dikutip pada 12 Januari 2022, dari <https://www.politico.eu/article/austria-far-right-sues-government-migrants-strache-borders/>
- Lynfield (2017). Refugees in Austria view new far-right leaders as existential threat. Diakses pada 26 Januari 2022, dari <https://www.jpost.com/international/refugee-s-in-austria-view-new-far-right-leaders-as-existential-threat-507630>
- Mcintosh (2019). Austria's FPÖ Freedom Party: A turbulent history. Diakses pada 25 September 2020, dari <https://www.dw.com/en/austrias-fp%C3%B6-freedom-party-a-turbulent-history/a-48789817>
- Scheidinger (2017). FPÖ-Wahlprogramm 2017: Wofür steht die FPÖ?. Diakses pada 22 Februari 2022, dari https://web.de.translate.google/magazine/politik/wahlen/nationalratswahl/nationalratswahl-2017-wahlprogramm-fpoe-begriff-fairness-32552374?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui,sc

Walter Klingenbeck, 2017, 9 Januari . FPÖ -
Johann Überbacher talks to PutinTV".
Youtube. <https://youtu.be/lqWusybgCAM>